

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG

TAHUN ANGGARAN
2020





SISTEMATIKA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SKPD

- Bab I Pendahuluan
- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
 - 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
 - 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
- Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD
- 2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
 - 2.2 Kebijakan keuangan
 - 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
- Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD
- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
 - 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- Bab IV Kebijakan akuntansi
- 4.1 Entitas akuntansi/entitas akuntansi/pelaporan keuangan daerah SKPD
 - 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
 - 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
 - 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD
- Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD
- 5.1 LRA
 - 5.1.1 Pendapatan LRA
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.2 NERACA
 - 5.2.1 Aset
 - 5.2.2 Kewajiban
 - 5.2.3 Ekuitas
 - 5.3 LO



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

	5.3.1	Pendapatan – LO
	5.3.2	Beban
	5.3.3	Kegiatan Non Operasional
	5.3.4	Pos Luar Biasa
	5.4	Laporan Perubahan Ekuitas
	5.4.1	Perubahan Ekuitas
Bab VI		Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD
Bab VII		Penutup



DAFTAR ISI

Sistematika Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD

- 2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 2.2 Kebijakan keuangan
- 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1 Entitas akuntansi/entitas akuntansi/pelaporan keuangan daerah SKPD
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD
- 4.5 Kebijakan akuntansi tertentu

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

- 5.1 LRA
 - 5.1.1 Pendapatan LRA
 - 5.1.2 Belanja
- 5.2 Neraca
 - 5.2.1 Aset
 - 5.2.2 Kewajiban
 - 5.2.3 Ekuitas
- 5.3 LO
 - 5.3.1 Pendapatan – LO
 - 5.3.2 Beban



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

5.3.3 Kegiatan Non Operasional

5.3.4 Pos Luar Biasa

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.1 Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD

Bab VII Penutup

Lampiran-Lampiran



BAB. I

PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang ini disusun untuk menyediakan informasi yang akurat, relevan dan sistematis mengenai laporan keuangan atas satu periode laporan keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang mulai bulan Januari s/d Desember 2020. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan Perundang-Undangan.

2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan Umum Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat, mengambil keputusan di lingkungan OPD dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya serta sebagai upaya pelaksanaan kegiatan secara sistematis pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2020.

Laporan keuangan ini menyediakan informasi mengenai pendapatan dan belanja sebagai suatu entitas pelaporan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Bentuk isi dan tata cara penyusunan dan penyajian laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan Pemerintah adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan, Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
- j. Peraturan Daerah Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang;
- k. Peraturan Daerah Nomor. 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;
- l. Peraturan Bupati Rembang Nomor. 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;
- m. Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 52).

C. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan keenam atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang maka sistematika isi Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

- | | |
|---------|---|
| Bab I | Pendahuluan |
| 1.1 | Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD |
| 1.2 | Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD |
| 1.3 | Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD |
| Bab II | Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD |
| 2.1 | Ekonomi Makro/Ekonomi Regional |
| 2.2 | Kebijakan keuangan |
| 2.3 | Indikator pencapaian target kinerja APBD |
| Bab III | Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD |
| 3.1 | Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD |



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- Bab IV Kebijakan akuntansi
 - 4.1 Entitas akuntansi/entitas akuntansi/pelaporan keuangan daerah SKPD
 - 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
 - 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
 - 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD
 - 4.5 Kebijakan akuntansi tertentu
- Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD
 - 5.1 LRA
 - 5.1.1 Pendapatan LRA
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.2 NERACA
 - 5.4.1 Aset
 - 5.4.1 Kewajiban
 - 5.4.3 Ekuitas
 - 5.3 LO
 - 5.2.1 Pendapatan LO
 - 5.2.2 Beban
 - 5.2.3 Kegiatan Non Operasional
 - 5.2.4 Pos Luar Biasa
 - 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.3.1 Perubahan Ekuitas
- Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD
- Bab VII Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Ekonomi Makro

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang merupakan unsur dari pelaksana bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan persandian di Pemerintah Kabupaten Rembang

Sesuai dengan visi Kabupaten Rembang yaitu terwujudnya masyarakat Rembang yang sejahtera melalui peningkatan Perekonomian dan Sumber Daya Manusia yang dilandasi semangat kebersamaan pemberdayaan masyarakat dan Kewirausahaan, Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penyelenggara pelayanan di bidang Komunikasi dan Informatika diharapkan mampu menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi lokal yang handal. Melalui Penyelenggaraan komunikasi dan informatika diharapkan mampu untuk mempercepat informasi kepada masyarakat terutama menjangkau keseluruhan wilayah pelosok pedesaan sehingga diharapkan adanya pemerataan pembangunan serta mewujudkan masyarakat yang mampu mengikuti informasi global disertai dengan pemerataan peningkatan dan pengembangan ekonomi lokal.

Untuk menunjang visi dan misi Kabupaten Rembang tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya semaksimal mungkin dengan meningkatkan sumber-sumber PAD melalui peningkatan pendapatan Retribusi Daerah di sektor Telekomunikasi dan memberikan pelayanan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sebagai stimulan untuk menciptakan semangat kebersamaan, dan pemberdayaan masyarakat serta kewirausahaan.

Dari penetapan APBD tahun 2020 sebanyak 7 Program dan 13 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp5.624.056.000,-. Dalam perubahan APBD Tahun 2019 mengalami perubahan anggaran menjadi sebesar Rp8.189.096.950,- pengurangan anggaran sebesar Rp2.565.040.950,- yaitu penambahan Belanja Langsung terdiri dari kegiatan :



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan
01	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	1.342.700.000	1.024.975.839	(317.724.161)
1	Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum	1.140.700.000	958.958.000	(181.742.000)
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	147.000.000	37.090.000	(109.910.000)
3	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	10.000.000	12.600.000	2.600.000
4	Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan	45.000.000	16.327.839	(28.672.161)
02	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000	26.700.600	(13.299.400)
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	20.000.600	(9.999.400)
6	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	6.700.000	(3.300.000)
03	Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	10.000.000	1.796.500	(8.203.500)
7	Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik	10.000.000	1.796.500	(8.203.500)
04	Program Pengembangan Informasi dan Pengelolaan Komunikasi Publik	535.000.000	331.356.311	(203.643.689)
8	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	405.000.000	300.581.311	(104.418.689)
9	Pembinaan Layanan Kehumasan	130.000.000	30.775.000	(99.225.000)



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

05	Program Pengembangan E-Government	3.663.000.000	1.540.290.000	(2.122.710.000)
10	Pengembangan dan Optimalisasi Pengelolaan e-government	3.218.000.000	882.160.000	(2.335.840.000)
11	Pengelolaan dan Pengembangan Data Elektronik	445.000.000	658.130.000	213.130.000
06	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	375.000.000	147.123.750	(227.876.250)
12	Penyusunan Data Statistik	375.000.000	147.123.750	(227.876.250)
07	Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah	175.000.000	84.800.000	(90.200.000)
13	Pengelolaan Persandian Daerah	175.000.000	84.800.000	(90.200.000)
	J U M L A H	6.140.700.000	3.157.043.000	(2.983.657.000)

2.2. Kebijakan Keuangan

a. Pendapatan

Sebagai Dinas yang baru dibentuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang berupaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui kebijakan pendapatan daerah ditingkatkan meliputi :

- 1) Melaksanakan dan mengamankan kebijaksanaan Pemerintah Daerah pada umumnya dan anggaran dan Belanja Daerah pada khususnya secara optimal.
- 2) Penetapan target PAD yang realistis sesuai dengan potensi riil sumber-sumber pendapatan yang ada pada masing-masing SKPD penghasil/pengelola pendapatan.
- 3) Mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan yang sudah ada dan mengupayakan penggalan sumber-sumber PAD baru dengan tidak memberatkan masyarakat.
- 4) Meningkatkan pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun sarana prasarana dan sistem serta prosedur/mechanisme administrasi Keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

- 5) Mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset daerah yang dapat menghasilkan penerimaan PAD.
- 6) Mengoptimalkan hubungan yang seimbang antara anggaran belanja dengan anggaran pendapatan masing-masing SKPD guna terciptanya keselarasan kemampuan keuangan daerah.
- 7) Memobilisir potensi sumber daya dan dana masyarakat secara berkelanjutan, adil dan merata.

Pada Tahun Anggaran 2020 Target Pendapatan dari Retribusi Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang sebesar Rp360.000.000,- dari penerimaan Retribusi Menara Telekomunikasi dan Realisasi untuk Tahun Anggaran 2010 Sebesar Rp408.466.867,- dengan capaian kinerja 113,469%.

b. Belanja

- 1). Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Anggaran Belanja tidak langsung untuk Tahun Anggaran 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Sebesar Rp5.624.056.000,- realisasi Rp5.291.783.315,- atau (94,09 %).
- 2). Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan meliputi :
 - a. Belanja Pegawai, untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS, uang lembur, Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS.
 - b. Belanja Barang dan jasa, untuk pengeluaran bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, perawatan kendaraan bermotor, perawatan alat kantor, cetak dan penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai.
 - c. Belanja modal, untuk pengeluaran pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat tidak bermotor, alat-alat angkutan di air bermotor, alat-alat angkutan di air tidak bermotor, alat-alat angkutan udara, alat-alat bengkel, alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer/Laptop dan printer, meubelair, peralatan dapur, penghias ruangan rumah tangga, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, kontruksi jalan, Kontruksi bangunan, kontruksi jembatan, kontruksi



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, buku/perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan/ternak dan tanaman. Anggaran untuk belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp8.868.339.000,- dan mengalami penurunan pada perubahan sebesar Rp3.244.283.000,- sehingga menjadi sebesar Rp5.624.056.000,-. Dengan Rincian sebagai berikut:

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	%
Belanja				
Belanja Langsung				
Belanja Pegawai	2.727.639.000	2.467.013.000	(260.626.000)	(9,56)
Belanja Barang dan Jasa	2.568.436.000	1.302.332.000	(1.266.104.000)	(49,29)
Belanja Modal	2.402.005.000	924.552.000	(1.477.453.000)	(61,51)
Jumlah Belanja	8.868.339.000	5.624.056.000	(3.224.283.000)	(36,58)

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Pencapaian Target untuk pendapatan adalah sebagai berikut:

URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	KURANG / LEBIH (Rp.)	%
Pendapatan Asli Daerah				
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	360.000.000	408.466.867	48.466.867	113,46
Jumlah Pendapatan	360.000.000	408.466.867	48.466.867	113,46

Pencapaian untuk Target Realisasi Anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	KURANG / LEBIH (Rp.)	%
BELANJA LANGSUNG				
Belanja Pegawai	2.727.639.000	2.467.013.000	(260.626.000)	(9,56)
Belanja Barang dan Jasa	1.302.332.000	1.232.310.289	(1.266.104.000)	(94,62)
Belanja Modal	924.552.000	794.704.152	(1.477.453.000)	(61,51)
JUMLAH BELANJA	8.868.339.000	5.624.056.000	(3.224.283.000)	(36,58)



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Keuangan OPD

3.1.1. Realisasi Pendapaatan

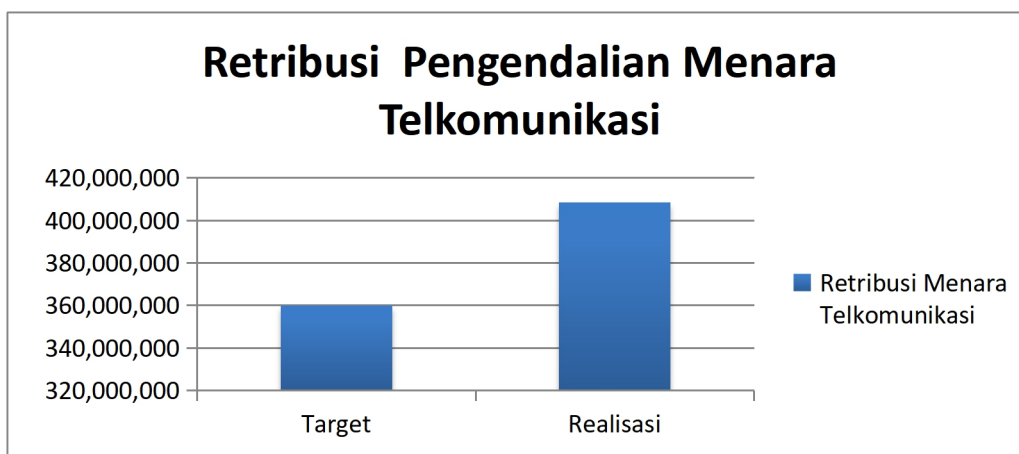
Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang adalah sebesar Rp360.000.000,- yang diperoleh dari Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Realisasi untuk Tahun 2020 adalah sebesar Rp408,466,867,- menunjukkan realisasi sebesar 113,46 % dari Target Retribusi. Tahun 2019 adalah sebesar Rp374.285.193,- menunjukkan realisasi sebesar 103,39% dari Target Retribusi.

Pencapaian target kinerja sumber Pendapatan tersebut diatas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel .1Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

No.	Nama Retribusi	Target	Realisasi
1	Pengendalian Menara Telekomunikasi	Rp360.000.000,-	408,466,867

Grafik 1: Pencapaian target kinerja Keuangan sumber Pendapatan





PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

3.1.2. Realisasi Belanja

Anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2020 sebesar Rp.5.624.056.000,- dengan rincian Belanja Pegawai Sebesar Rp2.467.013.000,- terealisasi sebesar Rp2.422.900.874,- Belanja Barang dan Jasa dengan anggaran Rp1.447.389.950,- terealisasi sebesar Rp1.369.501.277,- dan Belanja Modal Rp3.292.003.050,- terealisasi sebesar Rp3.094.969.819,-

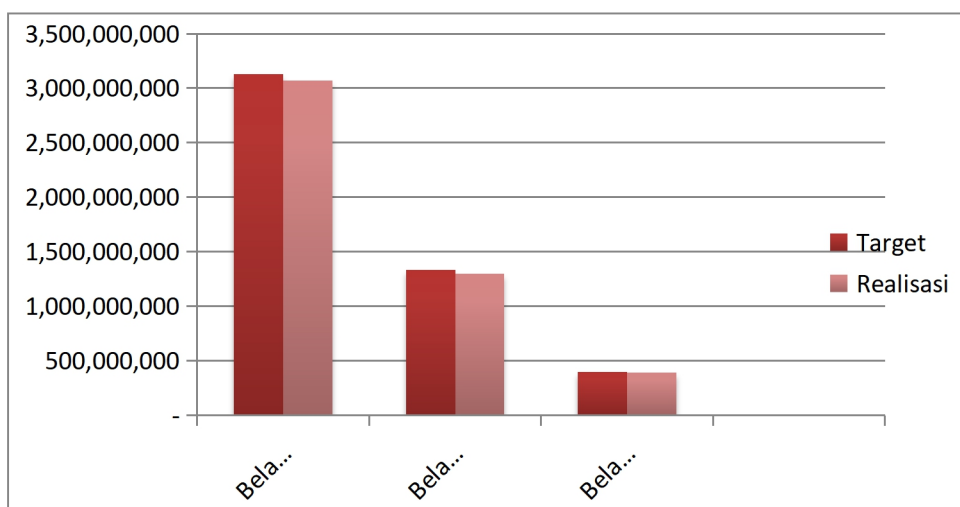
Pencapaian target Belanja Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel 2:

Pencapaian Target Kinerja Belanja

No.	Belanja	Target	Realisasi
1	Belanja Pegawai	Rp3.131.144.000	Rp3.069.273.994
2	Belanja Barang & Jasa	Rp1.332.180.000	Rp1.300.868.194
3	Belanja Modal	Rp401.160.000	Rp393.668.240

Grafik 2

Pencapaian target kinerja Belanja





3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

a. Hambatan dan Kendala dalam Pendapatan .

Hambatan dan kendala dalam pencapaian target pendapatan Retribusi Pengendalian Telekomunikasi untuk tahun 2020 ada hambatan dan kendala dalam Pencapaian target pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yaitu masih ada 3 (tiga) wajib retribusi yang belum membayar kewajibannya, namun demikian target dapat terealisasi 113,46 %.

b. Hambatan dan Kendala dalam Belanja

Secara keseluruhan tidak ada hambatan dan kendala dalam belanja, karena belanja sudah sesuai dengan kebutuhan dan efisiensi anggaran.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika yang merupakan unit pemerintahan sebagai pengguna anggaran/ pengguna barang yang didalamnya terdapat unit – unit kerja dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Sementara entitas pelaporan adalah unit pemerintah daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan laporan pertanggungjawaban daerah.

B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang adalah *Basis Akrual* baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Laporan Operasional dan Neraca serta Laporan Perubahan Ekuitas.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sementara Laporan Operasional mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan.

Anggaran yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang masih merupakan basis kas, untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Pendapatan LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas



pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

2. Belanja

Belanja semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

3. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

4. Pendapatan LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya.

Pendapatan – LO diakui sesuai dengan penetapannya.

5. Beban LO

Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional.

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari:

- a) Ekuitas awal;
- b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya :
 - 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d) Ekuitas akhir.

7. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2020.



Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan.

8. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa kas yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2020.

Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran baik uang logam, kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

9. Investasi Jangka Pendek

Adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Investasi Jangka Pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

10. Piutang

Piutang merupakan hak Pemerintah Daerah untuk menerima pembayaran dari pihak lain atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi dan Piutang Lainnya.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang

11. Penyisihan Piutang

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Perhitungan penyisihan piutang berdasarkan atas pengolongan kualitas umur piutang terdiri atas kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas diragukan dan kualitas macet.

Batasan atas kelompok umur piutang, dikelompokkan atas kelompok umur tahun baik untuk piutang pajak, piutang retribusi dan piutang lainnya kecuali untuk di RSUD dr. Soetrasno



berdasarkan ketentuan kebijakan akuntansi tersendiri di lingkup RSUD dr. Soetrasno sebagai BLUD.

12. Beban di bayar dimuka

Adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

Beban di bayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban dan diukur berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan.

13. Persediaan

Persediaan diakui pada saat diterima atau hal kepemilikannya dan/atau pengusaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stok opname).

Persediaan diakui berdasarkan nilai barang yang belum dapat terjual atau terpakai.

Persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian terakhir/harga standar apabila diperoleh dengan cara memproduksi sendiri.

14. Investasi Nonpermanen

Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi jenis ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, seperti investasi dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang. Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditarget.

15. Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dalam bentuk penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya jika kepemilikannya kurang dari 20 %.

Dan jika kepemilikannya 20 % atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan daerah. Nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada dalam laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

16. Aset Tetap



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Penilaian dan Pengukuran Aset Tetap adalah sebagai berikut:

- a. Penambahan aset tetap berasal dari belanja modal, belanja barang yang menghasilkan aset tetap, hibah berupa barang modal dan penilaian aktiva tetap yang telah dikuasai tetapi belum memiliki nilai buku. Pengurangan aset tetap bila ada hibah aset tetap kepada pihak ketiga dan ada penghapusan aset tetap;
- b. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut dalam kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan atau siap untuk digunakan/dipakai;
- c. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah;
- d. Aset tetap yang diperoleh dari donasi atau sumbangan/hadiah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya pada saat diperoleh dan dikuatkan dengan adanya Berita Acara Penyerahan dari pihak ketiga kepada Pemda;
- e. Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan;
- f. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang dan hilang. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Batas jumlah biaya untuk pengeluaran yang harus dikapitalisir sebagai aset tetap dan pengeluaran yang harus dibebankan sebagai belanja, ditentukan dengan menetapkan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Barang Milik/Kekayaan Daerah yang meliputi:
 - 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, alat olah raga yang sama dengan, atau lebih dari Rp300.000,00;
 - 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset ini dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/jaringan/irigasi dan aset tetap lainnya.

Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang mempunyai Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset sebagaimana di atas dicatat dalam pembukuan (*intra komptable*) dan menambah aset daerah.

BM/KD yang mempunyai nilai Aset di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dan hewan, ikan, dan tanaman, buku bahan bacaan dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan (*ekstra komptable*);



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

- h. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :
- 1) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara bertambah ekonomis/efisien, dan/atau bertambah umur ekonomis, dan/atau, bertambah volume, dan/atau, bertambah kapasitas produksi, dan/atau;
 - 2) Bukan merupakan pemeliharaan yang bersifat rutin;
 - 3) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- i. Kriteria batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Batas Kapitalisasi Aset Tetap

No	Uraian	Jumlah Harga per unit (Rp)
1.	Tanah	-
2.	Peralatan dan mesin	
	Alat-alat Berat	10.000.000
	Alat-alat Angkutan	
	- Angkutan roda 4	5.000.000
	- Angkutan roda 2	1.000.000
	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	1.000.000
	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1.000.000
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
	Alat-alat Kedokteran	1.000.000
	Alat-alat Laboratorium	1.000.000
	Alat Keamanan	1.000.000
3.	Gedung dan bangunan	
	Bangunan gedung	100.000.000
	Bangunan monumen	100.000.000
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	
	Jalan	100.000.000
	Bangunan air (Irigasi)	100.000.000
	Instalasi	100.000.000
	Jaringan	100.000.000
5.	Aset tetap lainnya	
	Buku dan perpustakaan	-
	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	
	Hewan/Ternak & Tumbuhan	-



- j. Pengeluaran belanja dalam bentuk barang diakui pada saat serah terima barang dan jasa dilakukan (BA serah terima barang dan jasa) sebesar nilai yang tercantum dalam BA serah terima.

17. Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya pembebasan tanah, belanja untuk memperoleh hak, pengukuran dan belanja penimbunan.

18. Peralatan dan Mesin

Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya langsung untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan. Mesin dan peralatan yang diperoleh dari dana donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya. Untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Kendaraan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar/harga gantinya, mebelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan. Mebelair dan perlengkapan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar.

19. Gedung dan Bangunan

Gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, harga pengurusan IMB notaris dan pajak.

20. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya lain-lain sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap untuk digunakan.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan.

Bangunan air diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.

21. Aset Tetap Lainnya

Buku perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Hutan ternak dan tanaman diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan hutan ternak dan tanaman tersebut siap untuk dimanfaatkan.

22. Konstruksi dalam Pengerjaan

Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

23. Biaya Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode (merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap).

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Masa manfaat aset tetap terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4. 2 Masa Manfaat Aset Tetap

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)	Masa Manfaat (Bulan)
1	3			ASET TETAP		
1	3	2		Peralatan dan Mesin		



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)	Masa Manfaat (Bulan)
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10	120
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8	96
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7	84
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	84
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2	24
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10	120
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3	36
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20	240
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10	120
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	60
1	3	2	11	Alat Ukur	5	60
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4	48
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4	48
1	3	2	14	Alat Kantor	5	60
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5	60
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4	48
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5	60
1	3	2	18	Alat Studio	5	60
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5	60
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10	120
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5	60
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5	60
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8	96
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10	120
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	120
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15	180
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10	120
1	3	2	28	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10	120
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7	84
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15	180
1	3	2	31	Senjata Api	10	120
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3	36
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5	60
1	3	3		Gedung dan Bangunan		
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	600
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	600
1	3	3	03	Bangunan Menara	40	480



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)	Masa Manfaat (Bulan)
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50	600
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50	600
1	3	3	06	Candi	50	600
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50	600
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50	600
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50	600
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50	600
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50	600
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
1	3	4	01	Jalan	10	120
1	3	4	02	Jembatan	50	600
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50	600
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50	600
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25	300
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10	120
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30	360
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40	480
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40	480
1	3	4	10	Bangunan Air	40	480
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30	360
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30	360
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10	120
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10	120
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40	480
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40	480
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30	360
1	3	4	18	Instalasi Gas	30	360
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20	240
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30	360
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40	480
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20	240
1	3	4	23	Jaringan Gas	30	360

Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.



Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :

- a) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- b) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan sesuai dengan table dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang.

24. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieleminasi dari neraca dan diungkapkan dalam CALK ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan di masa yang akan datang setelah ada Keputusan Kepala Daerah.

25. Aset lainnya

Aset lainnya terdiri dari aset tidak berwujud yang adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki dan digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya.

Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :

- a) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- d) Aset Tidak Berwujud;
- e) Aset Lain-lain.

26. Kewajiban Jangka Pendek

Bagian lancar kewajiban jangka panjang diakui pada saat periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar kewajiban jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan.



Kewajiban jangka pendek diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

Yang masuk dalam akun kewajiban jangka pendek adalah :

- a). Utang PFK
- b). Utang Bunga
- c). Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
- d). Pendapatan Diterima Dimuka
- e). Utang Beban

27. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan kewajiban yang telah diakui dalam periode berjalan. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar pemerintah yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan.

28. Ekuitas Dana

Adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yang dihitung dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

D. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standart Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang yang berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menjadi pedoman penyusunan laporan keuangan OPD atau pemerintah daerah setempat.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.1.1. PENDAPATAN LRA

Akun		2020	%	2019
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1		2	3	4=3/2
1	Pendapatan Asli Daerah	360.000.000,-	417.125.247,-	115,93
2	Pendapatan Transfer	0,-	0,-	0,-
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,-	205.742,-	0,-
Jumlah		360.000.000,-	417.330.989,-	115,93

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 sebesar Rp.417.330.989,- atau 115,93% dari anggarannya sebesar Rp360.000.000,- dan meningkat dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp374.285.193,-

Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2020 sebesar Rp417.330.989,- atau 115,93% dari anggarannya sebesar Rp360.000.000,- yang terdiri dari:

Akun		2020	%	2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1		2	3	4=3/2
	Pajak Daerah	0,-	0,-	0,-
	Retribusi Daerah	360.000.000,-	417.125.247,-	115,93
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,-	0,-	0,-
	Lain-lain PAD yang Sah	0,-	205.742,-	0,-
Jumlah		360.000.000,-	417.330.989,-	115,93

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2020 meningkat sebesar Rp417.330.989,- dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp374.285.193,- yang terdiri dari:

a. Retribusi Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Pendapatan daerah dari retribusi daerah TA 2020 terealisasi sebesar Rp417.330.989,- atau 115,93% dari anggaran sebesar Rp360.000.000,00 meningkat sebesar Rp43.045.796,- dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp374.285.193,- yang terdiri dari:

Akun	2020		%	2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4=3/2	5
1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	360.000.000,-	417.330.989,-	115,93	374.285.193,-
Jumlah	360.000.000,-	417.330.989,-	115,93	374.285.193,-

Target penerimaan Retribusi 104,51%

5.1.2. BELANJA

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Rembang TA 2020 adalah sebagai berikut:

Akun	2020		%	2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4=3/2	5
1 Belanja Pegawai	3.397.172.000	3.263.866.374.000	(96,08)	3.211.103.196,00
2 Belanja Barang dan Jasa	1.302.332.000	1.232.310.289	(94,62)	1.369.501.277,00
3 Belanja Modal	924.552.000	794.704.152	(85,96)	3.094.969.819,00
Jumlah	5.624.056.000	5.290.880.815	(92,58)	7.675.574.292,00

Realisasi Belanja Daerah TA 2020 sebesar Rp5.290.880.815,00 atau 94,08% dari anggarannya sebesar Rp5.624.056.000.000,00

a) Belanja Operasi

1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 sebesar Rp3.263.866.374.000,00 atau 96,08% dari anggarannya sebesar Rp3.397.172.000,00. Realisasi TA 2020 meningkat dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp3.211.103.196,00 yang terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Akun		2020		%	2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1		2	3	4=3/2	5
a	Belanja Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0	0,00
b	Tambahan Penghasilan PNS	0,00	0,00	0	0,00
c	Belanja Penerimaan Lainnya, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	0,00	0,00	0	0,00
d	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0	0,00
e	Belanja Pegawai (Belanja Langsung)	3.397.172.000,00	3.263.866.374.000,00	96,08	3.211.103.196.000,00
Jumlah		3.397.172.000,00	3.263.866.374.000,00	96,08	3.211.103.196.000,00

Belanja Langsung untuk belanja pegawai terealisasi sebesar 96,08%, Pada Tahun 2019 Belanja Langsung untuk belanja pegawai terealisasi 97,21 %.

2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2020 sebesar Rp1.232.310.289,00 atau 94,62% dari anggaran sebesar Rp1.302.332.000,00

3. Belanja Modal

Realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp794.704.152,00 atau 94,01% dari anggaran sebesar Rp924.552.000,00

Belanja Modal		2020		%	2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1		2	3	4=3/2	5
a.	Tanah	0,00	0,00	0	0,00
b.	Peralatan dan Mesin	923.052.000,00	793.204.152,00	85,93	2.996.159.669,00
c.	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0	0,00
d.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0	0,00
e.	Aset Tetap Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	100	0,00
JUMLAH		924.552.000,00	794.704.152,00	85,96	3.094.969.819,00

SURPLUS (DEFISIT)



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Surplus (Defisit) merupakan selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang TA 2020 mengalami surplus/defisit sebesar Rp4.873.549.828,00 dari anggaran yang dianggarkan defisit sebesar Rp5.264.056.000,00

5.2. NERACA

5.4.1. ASET

1. Kas di Bendahara		31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pengeluaran		<u>Rp.0,00</u>	<u>Rp. 0,00</u>

Tidak ada realisasi Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang per 31 Desember 2020.

2. Kas di Bendahara		31 Desember 2020	31 Desember 2019
Penerimaan		<u>Rp.0,00</u>	<u>Rp.0,00</u>

Tidak ada realisasi Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang per 31 Desember 2020.

3. Piutang Retribusi		31 Desember 2020	31 Desember 2019
		<u>Rp39.001.038,00</u>	<u>Rp44.006.055,00</u>

Ada realisasi Piutang Retribusi pengendalian menara telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang per 31 Desember 2020 sebesar Rp39.001.038,00 berupa :

NO	NAMA PEMILIK MENARA/ALA MAT DEBITUR	SURAT KETetapan		TANGGAL JATUH TEMPO	TGL. LAP 31 DES 2020	KETERLAMBATAN (6-5)		LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGU KAN	MACET	PIUTANG
		NOMOR	TANGGAL					0-1 Th (0,5%)	1-2 Th (10%)	2-3 Th (50%)	> 3 Th (100%)	
1	PT. Telkomsel	001/SKR/2.10 .01.01/7/2020	01/07/2020	31/12/2020	31/12/2020	-	Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PT. XL Axiata	002/SKR/2.10 .01.01/7/2020	01/07/2020	31/12/2020	31/12/2020	-	Tahun	12.469,25	0,00	0,00	0,00	12.469,25
3	PT. Protelindo	003/SKR/2.10 .01.01/7/2020	01/07/2020	31/12/2020	31/12/2020	-	Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PT. Tower Bersama Group	004/SKR/2.10 .01.01/7/2020	01/07/2020	31/12/2020	31/12/2020	-	Tahun	22.860,29	1.163.796,40	0,00	0,00	1.186.656,69
5	PT. Dayamitra Telekomunikasi	005/SKR/2.10 .01.01/7/2020	01/07/2020	31/12/2020	31/12/2020	-	Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	PT. Dian Swastika Santosa	006/SKR/2.10 .01.01/7/2020	01/07/2020	31/12/2020	31/12/2020	-	Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PT. Indosat	007/SKR/2.10 .01.01/7/2020	01/07/2020	31/12/2020	31/12/2020	-	Tahun	29.094,92	0,00	0,00	0,00	29.094,92



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

8	PT. Datalink Manunggal	008/SKR/2.10.01.01/7/2020	01/07/2020	31/12/2020	31/12/2020	-	Tahun	0,00	304.803,90	0,00	0,00	304.803,90
9	PT. Solusindo Kreasi Pratama	009/SKR/2.10.01.01/7/2020	01/07/2020	31/12/2020	31/12/2020	-	Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PT. Solusi Tunas Pratama	010/SKR/2.10.01.01/7/2020	01/07/2020	31/12/2020	31/12/2020	-	Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (PT.STI)	011/SKR/2.10.01.01/7/2020	01/07/2020	31/12/2020	31/12/2020	-	Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	PT. H3i	012/SKR/2.10.01.01/7/2020	01/07/2020	31/12/2020	31/12/2020	-	Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	PT. Inti Bangun Sejahtera	013/SKR/2.10.01.01/7/2020	01/07/2020	31/12/2020	31/12/2020	-	Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	PT. Towerindo Konvergensi	014/SKR/2.10.01.01/7/2020	01/07/2020	31/12/2020	31/12/2020	-	Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	PT. Putra Arga Binangun	015/SKR/2.10.01.01/7/2020	01/07/2020	31/12/2020	31/12/2020	-	Tahun	15.586,56	623.462,40	0,00	0,00	639.048,96
16	PT. Permata Karya Perdana	016/SKR/2.10.01.01/7/2020	01/07/2020	31/12/2020	31/12/2020	-	Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	PT. Infra Media Dinamika	017/SKR/2.10.01.01/7/2020	01/07/2020	31/12/2020	31/12/2020	-	Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	PT. Triview Geospasial Mandiri	018/SKR/2.10.01.01/7/2020	01/07/2020	31/12/2020	31/12/2020	-	Tahun	10.391,04	0,00	0,00	0,00	10.391,04
19	PT. Inforte Solusi Infortek	019/SKR/2.10.01.01/7/2020	01/07/2020	31/12/2020	31/12/2020	-	Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	PT. Centratama Menara Indonesia	020/SKR/2.10.01.01/7/2020	01/07/2020	31/12/2020	31/12/2020	-	Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	PT. Protelindo	003/SKR/2.10.01.01/12/2020	02/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	-	Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PT. Dayamitra Telekomunikasi	005/SKR/2.10.01.01/12/2020	02/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	-	Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH								90.402,06	2.092.062,70	0	0	2.182.464,76

5. Penyisihan Piutang

31 Desember 2020

31 Desember 2019

Rp39.001.038

Rp220.030,28

Ada realisasi Penyisihan Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Rembang per 31 Desember 2020 sebesar Rp39.001.038 berupa :

DAFTAR PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2020

URAIAN RINCIAN PIUTANG	SALDO AWAL	MUTASI 2020		SALDO AKHIR	AGING SCHEDULE				PENYISIHAN PIUTANG	SALDO NRV
		PENAMBAHAN	PENGURANGAN		LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET		



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

					0-1 Th (0,5%)	1-2 Th (10%)	2-3 Th (50 %)	> 3 Th (100%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+ 9)	11= (5-10)
PT. Telkomsel	-	85.968.546	85.968.546	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT. XL Axiata	10.287.130	2.493.850	10.287.130	2.493.850	12.469,25	0,00	0,00	0,00	12.469,25	2.481.381
PT. Protelindo	-	76.703.196	76.703.196	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT. Tower Bersama Group	11.637.964	62.900.435	58.328.377	16.210.022	22.860,29	1.163.796,40	0,00	0,00	1.186.656,69	15.023.365
PT. Dayamitra Telekomunikasi	-	44.970.118	44.970.118	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT. Dian Swastika Santosa	-	30.341.840	30.341.840	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT. Indosat	-	5.818.983	-	5.818.983	29.094,92	0,00	0,00	0,00	29.094,92	5.789.888
PT. Datalink Manunggal	3.048.039	3.048.039	3.048.039	3.048.039	0,00	304.803,90	0,00	0,00	304.803,90	2.743.235
PT. Solusindo Kreasi Pratama	-	4.156.417	4.156.417	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT. Solusi Tunas Pratama	10.720.090	10.720.090	21.440.180	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (PT.STI)	-	3.740.775	3.740.775	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT. H3i	-	3.463.680	3.463.680	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT. Inti Bangun Sejahtera	-	19.569.795	19.569.795	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT. Towerindo Konvergensi	-	7.481.550	7.481.550	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT. Putra Arga Binangun	6.234.624	3.117.312	-	9.351.936	15.586,56	623.462,40	0,00	0,00	639.048,96	8.712.887
PT. Permata Karya Perdana	2.078.208	2.078.208	4.156.416	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT. Infra Media Dinamika	-	1.385.472	1.385.472	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT. Triview Geospasial Mandiri	-	2.078.208	-	2.078.208	10.391,04	0,00	0,00	0,00	10.391,04	2.067.817
PT. Inforte Solusi Infortek	-	2.078.208	2.078.208	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT. Centratama Menara Indonesia	-	7.793.280	7.793.280	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT. Protelindo	-	5.818.983	5.818.983	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT. Dayamitra Telekomunikasi	-	26.393.245	26.393.245	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	44.006.055	412.120.230	417.125.247	39.001.038	90.402,06	2.092.062,70	-	-	2.182.464,76	36.818.573,25

Tidak ada realisasi Beban Dibayar Dimuka pada Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Rembang per 31 Desember 2020.

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
6. Beban dibayar dimuka	Rp0,00	Rp0,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

31 Desember 2020					31 Desember 2019			
7. No	Uraian	Nilai Beban (Rp)	Periode	Perhitungan Beban per Hari	Beban s.d 31 Desember 2020		Beban dibayar dimuka	
					Jml hari	Nilai	Jml hari	Nilai
1.	Nihil							
			Jumlah					
Rp. 494.200,00					Rp. 437.000,00			

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp494.200,00 menurun sebesar Rp437.000,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp437.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Persediaan	31 Des 2020	31 Des 2019
1.	Persediaan Bahan Pakai Habis		
	Persediaan Alat Tulis Kantor	227.200,00	307.000,00
	Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	66.000,00	27.000,00
	Bahan dan jaringan komputer	100.000,00	50.000,00
	Peralatan dan Alat Kebersihan	101.000,00	53.000,00
	Jumlah	494.200,00	437.000,00

Data tersebut diisi berdasarkan hasil stock opname yang telah dilakukan OPD, (form tercantum pada Surat Edaran Penyusunan Laporan Akhir Tahun).

31 Desember 2020		31 Desember 2019	
8. Investasi Non Permanen	Rp 0,00		Rp 0,00

Tidak ada Investasi Non Permanen yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.

31 Desember 2020		31 Desember 2019	
9. Investasi Permanen	Rp 0,00		Rp 0,00

Tidak ada realisasi Investasi Permanen pada Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Rembang per 31 Desember 2020.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

10. Aset Tetap	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp6.998.337.641,00	Rp6.425.168.894,00

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rembang yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang berada dibawah koordinasi OPD yang bersangkutan. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemkab Rembang melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya.

Nilai saldo aset tetap Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.998.337.641,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp6.425.168.894,00,- tersaji sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2020 (Rp.)	31 Desember 2019 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
a. Tanah	0,00	0,00	0,00	0
b. Peralatan dan Mesin	4.367.946.581,00	3.796.277.834,00	571.668.747,00	1,51%
c. Gedung & Bangunan	1.755.222.400,00	1.755.222.400,00	0,00	0
d. Jalan, Irigasi & Jaringan	872.268.960,00	872.268.960,00	0,00	0
e. Aset Tetap Lainnya	2.899.700,00	1.399.700,00	1.500.000,00	2,072%
f. Konstruksi dlm Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0
Jumlah Aset Tetap	6.998.337.641,00	6.425.168.894,00	573.168.747,00	1,089%



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Sedangkan kenaikan/penurunan aset tetap dalam tahun anggaran 2020 sebesar Rp573.168.747,00, (nilai penambahan 2020 – pengurangan 2019) atau sebesar 1,089 % dibanding dengan saldo per 31 Desember 2019, adalah sebagai berikut

Aset Tetap	2020	2019	Kenaikan / Penurunan (Rp.)	%
a. Tanah	0,00	0,00	0,00	0
b. Peralatan dan mesin	4.367.946.581,00	3.796.277.834,00	571.668.747,00	1,51%
c. Gedung dan bangunan	1.755.222.400,00	1.755.222.400,00	0,00	0
d. Jalan irigasi dan jaringan	872.268.960,00	872.268.960,00	0,00	0
e. Aset tetap lainnya	2.899.700,00	1.399.700,00	1.500.000,00	2,072%
f. Konstruksi dalam pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0
Jumlah Aset Tetap	6.998.337.641,00	6.425.168.894,00	573.168.747,00	1,089%

Penambahan sebesar Rp573.168.747,00 berasal dari belanja modal sebesar Rp573.168.747,00 ditambah sejumlah Rp6.425.168.894,00 berupa aset tetap tahun 2019.

Saldo masing – masing kelompok aset tetap per 31 Desember 2019, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tanah

Tidak terdapat Realisasi Tanah per 31 Desember 2020.

b. Peralatan dan Mesin

Saldo peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.796.277.834,00 meningkat sebesar Rp1.837.878.263,00 dibandingkan saldo tahun 2018 sebesar Rp3.623.061.521,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Peralatan dan Mesin	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/Penurunan
1	Alat-alat Besar	-	-	-
2	Alat-alat Angkut	802.964.810,00	802.964.810,00	-
3	Alat-alat Bengkel	6.850.000,00	7.800.000,00	(950.000,00)
4	Alat-alat Pertanian & Peternakan	-	-	-
5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	717.534.179,00	1.928.578.655,00	(1.211.044.476,00)
6	Alat-alat Studio dan Komunikasi	1.125.477.247,00	1.055.534.369,00	69.942.878,00
7	Alat-alat Kedokteran	-	-	-
8	Alat-alat Laboratorium	-	-	-
9	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	1.400.000,00	1.400.000,00	-
	Jumlah	2.652.826.236,00	3.796.277.834,00	(1.142.051.598,00)

Penjelasan kenaikan/penurunan masing-masing kelompok peralatan dan mesin sebagai berikut:

- 1) Tidak ada realisasi Alat-alat Besar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang per 31 Desember 2020.
 - 2) Tidak ada realisasi Saldo Alat-alat Angkut per 31 Desember 2020 sebesar Rp802.964.810,
 - 3) Tidak ada realisasi Saldo Alat-alat Bengkel dan ukur per 31 Desember 2020.
 - 4) Tidak ada realisasi Saldo Alat-alat Pertanian dan Peternakan per 31 Desember 2020.
 - 5) Ada realisasi Saldo Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2020 sebesar Rp.717.534.179,00 meningkat sebesar Rp.233.198.400,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp484.335.779,00. Kenaikan tersebut terjadi karena penambahan dari realisasi belanja modal berupa pengadaan peralatan e-presensi.
 - 6) Saldo Alat-alat Studio dan Komunikasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.125.477.247,00 meningkat sebesar Rp69.942.878,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.055.534.369,00. Kenaikan tersebut terjadi karena penambahan dari realisasi belanja modal sebesar Rp69.942.878,00 berupa pembelian Peralatan alat studio & komunikasi berupa pengadaan alat-alat sandi.
 - 7) Tidak ada realisasi Saldo Alat-alat Kedokteran per 31 Desember 2020.
 - 8) Tidak ada realisasi Saldo Alat-alat Laboratorium per 31 Desember 2020.
 - 9) Tidak ada realisasi Saldo Alat-alat Persenjataan/Keamanan per 31 Desember 2020.
- c. Tidak ada realisasi gedung dan bangunan per 31 Desember 2020.
- d. Tidak ada realisasi saldo Bangunan Monumen per 31 Desember 2020.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

- e. Tidak ada realisasi saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2020
- f. Aset Tetap Lainnya

Ada realisasi saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020.

No	Uraian	31 Desember 2020 (Rp.)	31 Desember 2019 (Rp.)	Kenaikan/ penurunan
1	Buku bacaan	1.500.000,00	1.399.700,00	2.899.700,00
2	Barang bercorak	0,00	0,00	0,00
3	Hewan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.500.000,00	1.399.700,00	2.899.700,00

Penjelasan masing-masing kelompok Aset Lainnya sebagai berikut:

- 1) Tidak ada realisasi saldo buku bacaan per 31 Desember 2020.
- 2) Tidak ada realisasi saldo Barang bercorak Kesenian/Kebudayaan per 31 Desember 2020.
- 3) Tidak ada realisasi saldo Hewan/Ternak dan Tumbuhan per 31 Desember 2020.

- g. Konstruksi dalam Pengerjaan

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp.)	31 Desember 2018 (Rp.)	Kenaikan/ penurunan
1	NIHIL			
2				
	Jumlah			

- h. Akumulasi Penyusutan

Nilai penyusutan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Penyusutan tidak termasuk Tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.

Nilai akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.583.001.198,00 naik sebesar Rp944.573.941,00 di bandingkan dengan nilai akumulasi penyusutan TA 2019audited sebesarRp1.638.427.257,00 dengan rincian sebagai berikut :
 (data akumulasi penyusutan secara utuh terlampir)

11. Aset Lainnya	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp2.899.700,00	Rp1.399.700,00

Aset lainnya pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.899.700,00 ada peningkatan sebesar Rp1.500.000,0 dibandingkan saldo TA 2019 sebesar Rp1.399.700,00.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

- a. Saldo Aset Lainnya yang berasal dari Aset Tak Berwujud, yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Software komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, Lisensi dan franchise, Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, telah dihapus oleh Pengelola Barang Milik Daerah dengan Keputusan Nomor 030/0492/2019 tanggal 19 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Aset tak berwujud	31 Desember 2020 (Rp.)	31 Desember 2019 (Rp.)	Kenaikan/ penurunan
1	Software	0,00	0,00	0,00
2				
Jumlah		0,00	0,00	0,00

- b. Tidak ada realisasi Saldo Aset Lainnya yang berasal barang yang masuk dalam rusak berat (RB) yang akan diusulkan untuk dilakukan penghapusan

No	Uraian Aset rusak berat	31 Desember 20x1 (Rp.)	31 Desember 20x0 (Rp.)	Kenaikan/ penurunan
	NIHIL			

5.4.2. KEWAJIBAN

1. Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2020 Rp.0,00	31 Desember 2019 Rp.0,00
----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Tidak ada saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019.

Uraian	31 Desember 20X1 (Rp.)	31 Desember 20X0 (Rp.)
a. Utang kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00
b.,00,00
c.,00,00
Jumlah	Rp.0,00	Rp.0,00

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	31 Desember 20X1 Rp.0,00	31 Desember 20X0 Rp.0,00
---	-----------------------------	-----------------------------



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Tidak ada realisasi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pada tanggal 31 Desember 2019.

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
b. Utang Bunga	Rp 0,00	Rp 0,00

Tidak ada realisasi Utang Bunga per 31 Desember 2020.

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
c. Pendapatan diterima di muka	Rp 0,00	Rp 0,00

Kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

Tidak ada realisasi saldo pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2019.

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
d. Utang Beban	Rp. 8.757.906,00	Rp. 18.413.952,00

Saldo utang beban dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp 8.757.906,00, menurun dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp 18.413.952,00, adalah pembayaran pemakaian jasa listrik, Internet yang belum terbayarkan, karena sudah timbul kewajiban maka dicatat sebagai utang beban.

Utang beban sampai per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	PERIODE PEMBAYARAN	BELANJA YANG MASIH HARUS DIBAYAR
1	Tagihan Listrik	31 Desember 2020	2.359.306
2	Tagihan Internet	31 Desember 2020	6.398.600
	Jumlah		8.757.906

	31 Desember 20X1	31 Desember 20X0
1. Kewajiban Jangka Panjang	Rp.0,00	Rp.0,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Tidak ada realisasi saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2020.

5.4.3. EKUITAS

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Daerah pada kondisi waktu tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban dengan Saldo Ekuitas per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.606.779.368,24 mengalami peningkatan sebesar Rp106.972.414,52 atau 0,97%, jika dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.499.806.953,72.

5.3. LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1. PENDAPATAN LO

Pendapatan LO dapat dikalsifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 sebesar Rp412.325.972,00, meningkat sebesar Rp1.031.356,00 dibandingkan realisasi TA 2019 Rp411.294.616,00.

Masing – masing Pendapatan LO dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah - LO

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 sebesar Rp411.294.616,00, meningkat sebesar Rp31.470.075,00 dibandingkan realisasi TA 2018 Rp379.824.541,00.

Uraian	2020	2019	Kenaikan/ penurunan
Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah	412.120.230,00	411.045.231,00	1.074.999,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	205.742,00	249.385,00	(43.643,00)
Jumlah	412.325.972,00	411.294.616,00	1.031.356

a. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Daerah – LO dari pos Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

Akun	2020	2019	Kenaikan/ penurunan
------	------	------	------------------------



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

1	2	3	4
1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	412.120.230,00	411.045.231,00	1.074.999,00
Jumlah	412.120.230,00	411.045.231,00	1.074.999,00

5.3.2 BEBAN-LO

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar – benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi beban tersebut tahun 2020 dan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 yang terealisasi sebesar Rp3.257.418.294,00.

Uraian	2020	2019	Kenaikan/penurunan
Beban Pegawai LO	3.257.418.294,00	3.217.551.276,00	39.867.018,00
Jumlah	3.257.418.294,00	3.217.551.276,00	39.867.018,00

b. Beban barang dan jasa

Beban barang dan jasa merupakan saldo beban periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.110.971.070,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/penurunan
1	Beban Barang dan Jasa	1.110.971.070,00	1.344.052.041,00	25.537.835,00
	Jumlah	1.110.971.070,00	1.344.052.041,00	25.537.835,00

c. Beban penyusutan dan amortisasi

Beban ini merupakan Beban Penyusutan yang berasal dari Belanja Modal Perolehan di tahun anggaran 2020, Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

pada dokumen dan dilakukan perhitungan penyusutan secara bulanan, Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2020 adalah Rp694.810.059,00,- Beban Penyusutan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/penurunan
Beban Penyusutan dan Amortisasi	694.810.059,00	365.544.615,00	329.265.444,00
Jumlah	694.810.059,00	365.544.615,00	329.265.444,00

d. Beban penyisihan piutang

Ada realisasi Beban penyisihan piutang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.962.434,48.

Uraian	2020	2019	Kenaikan/Penurunan
Beban Penyisihan Piutang	1.962.434,48	185.047,12	1.777.387,36
Jumlah	1.962.434,48	185.047,12	1.777.387,36

SURPLUS/ DEFISIT- LO

Surplus/Defisit - LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan. Defisit Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.843.882.285,48.

5.4. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.4.1. Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal ekuitas, penambahan atau pengurangan surplus (defisit) dari operasional tahun berjalan serta dampak akumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan dan adanya kesalahan mendasar. Laporan Operasional pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Saldo awal ekuitas sebesar Rp4.499.806.953,72 merupakan saldo akhir ekuitas tahun anggaran 2020
2. Surplus/defisit – LO tahun anggaran 2020 sebesar Rp(4.843.882.285,48) merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca.
3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.
4. Koreksi aset tetap dari bidang aset berupa mutasi barang dari BPPKAD berupa 1 unit laptop sebesar Rp14.325.000,00
5. Koreksi akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp62.979.874,00
6. Ekuitas akhir.
Ekuitas Akhir Dinas Komunikasi dan Informatika bernilai Rp4.606.779.368,24.

BAB. VI



PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

6. 1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2019, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok :

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian

b. Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. 2. Arah Kebijakan, program/kegiatan Tahun Anggaran 2020

1. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dalam melaksanakan program kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika yang handal dan memberikan nilai tambah pendapatan Daerah.
- b. Mengembangkan hubungan yang harmonis dan strategis dalam menyelenggarakan pelayanan di bidang Komunikasi dan Informatika.
- c. Mengembangkan sarana dan prasarana di bidang Komunikasi dan Informatika secara terpadu.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

- d. Menumbuhkan peran serta swasta dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa Komunikasi dan Informatika;
2. Program/Kegiatan
- Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah /4 Kegiatan
 - Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah /2 Kegiatan
 - Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik/1 Kegiatan
 - Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah/1 Kegiatan
 - Program Pengembangan Informasi dan Pengelolaan Komunikasi Publik/2 Kegiatan
 - Program Penyelenggaraan Statistik Sektor/1 Kegiatan
 - Program Pengembangan E-Government/2 Kegiatan



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BAB. VII

PENUTUP

- Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan untuk Tahun 2020, segala saran dan masukan sangat kami butuhkan guna penyempurnaan catatan ini.
- Catatan atas Laporan Keuangan ini kiranya dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban Keuangan Dinas.

Rembang, Desember 2020
Plt. KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIS

Drs. ANDI DIMYANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19621215 199003 1 012